

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas merupakan ukuran kinerja suatu organisasi. Efektivitas dapat diartikan sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan sumber daya yang tersedia. Perusahaan ketika menjalankan kegiatannya membutuhkan pengelolaan usaha yang efektif agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati, bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang kredit diperlukan kebijakan pengelolaan kredit yang efektif agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tanpa pengelolaan yang kebijakan kredit yang baik perusahaan akan sulit untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

Kebijakan kredit memiliki peran sebagai panduan dalam melaksanakan semua kegiatan perkreditan. Kebijakan pengelolaan kredit yang efektif merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan penyalur kredit agar perusahaan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalisasi risiko yang timbul dari pemberian kredit dari perusahaan kepada debitur. Menurut Suhardjono (2007:100) “Kebijakan kredit harus diprogram dengan baik dengan didasari prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah”. Program kehati-hatian yang artinya penilaian objektif yang didasarkan atas asas 5C, 7P dan 3R. Prinsip 5C yang diterapkan berupa penilaian yang didasarkan pada *character* yang artinya menilai

berdasarkan watak, *capacity* merupakan penilaian berdasarkan kemampuan membayar kembali kredit yang diberikan, *capital* merupakan penilaian berdasarkan modal yang dimiliki peminjam, *collateral* merupakan penilaian melalui jaminan yang diberikan dan *condition* yang merupakan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang. Prinsip 7P merupakan rincian dari prinsip 5C yang meliputi *personality* (kepribadian), *party* (pengklasifikasian nasabah), *purpose* (tujuan kredit), *prospect* (keadaan nasabah dimasa datang), *profitability* (kemampuan nasabah mencari laba), *protection* (perlindungan atas kredit yang diberikan). Sedangkan 3R meliputi *return*, *repayment* dan *risk bearing ability*. Kebijakan kredit yang dijalankan dengan baik akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, salah satunya adalah dapat mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Setiap perusahaan mempunyai tujuan umum yaitu mendapatkan profitabilitas dari kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan. Bank sebagai perusahaan atau lembaga keuangan juga mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan dalam menghasilkan profit melalui operasi bank (Abdullah, 2005:124). Profitabilitas bank dapat diperoleh dari kegiatan operasi bank seperti keuntungan atau bunga yang didapatkan dari kegiatan perkreditan bank.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan kredit harus benar-benar paham mengenai kebijakan kredit yang diterapkan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa perbankan lainnya harus bisa mengelola kegiatan perbankannya dengan baik. Bank mengeluarkan dananya kepada masyarakat dianggap sebagai investasi yang diharapkan akan mendapat keuntungan atau profitabilitas dari penyaluran kredit tersebut. Bank perkreditan rakyat (BPR) merupakan salah satu lembaga keuangan yang melayani kegiatan perkreditan. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja. Penghimpunan dana yang dilakukan bank hanya berupa produk tabungan dan deposito berjangka, sedangkan untuk penyaluran dana BPR memberikan kredit kepada masyarakat.

PT BPR Surya Artha Utama merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan kredit bagi masyarakat. Kegiatan perbankan yang dilakukan PT BPR Surya Artha Utama Surabaya adalah melayani masyarakat untuk memberikan rekening tabungan, deposito berjangka maupun pemberian kredit. PT BPR Surya Artha Utama Surabaya mengalami kendala ketidakmampuan mempertahankan laba yang telah dihasilkan dan memiliki kredit bermasalah. Data kolektibilitas kredit PT BPR Surya Artha Utama Surabaya tahun 2008-2010 disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Data Kolektibilitas PT BPR Surya Artha Utama Surabaya Tahun 2008-2010

(dalam Rupiah)

	2008	2009	2010
Lancar	20.776.423.260	26.562.648.000	30.358.980.000
Kurang Lancar	-	-	63.835.000
Diragukan	-	-	74.629.000
Macet	-	-	-
Jumlah	20.776.423.260	26.562.648.000	30.632.073.000
NPL	0%	0%	0,45%

Sumber: PT BPR Surya Artha Utama Surabaya

Tabel tersebut menunjukkan tingkat *non performing loans* (NPL) yang meningkat pada tahun 2010. Tingkat NPL yang dimiliki bank meningkat 0,45%. Meningkatnya NPL dikarenakan adanya pengelolaan kredit yang kurang efektif sehingga terjadi kredit macet pada PT BPR Surya Artha Utama Surabaya.

Pemberian kredit bagi masyarakat diharapkan dapat kembali tepat pada waktunya ataupun dalam waktu singkat, sehingga dana tersebut dapat dipergunakan kembali sebagai investasi lain yang lebih produktif dan menguntungkan, oleh karena itu bank memerlukan manajemen kredit yang baik agar memberikan keuntungan bagi bank yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Kredit Untuk Meningkatkan Profitabilitas (Studi pada PT BPR Surya Artha Utama Surabaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, perumusan masalah yang akan dikemukakan sesuai dengan obyek penelitian yang akan diteliti, maka perumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana kebijakan kredit pada PT BPR Surya Artha Utama Surabaya?
2. Bagaimana efektivitas kebijakan kredit yang dilaksanakan PT BPR Surya Artha Utama Surabaya untuk meningkatkan profitabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang ada yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan kredit pada PT BPR Surya Artha Utama Surabaya.
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas kebijakan kredit yang dilaksanakan oleh PT BPR Surya Artha Utama Surabaya sebagai upaya meningkatkan profitabilitas.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai permasalahan dalam dunia kerja di perusahaan dan melatih peneliti agar mampu berfikir ilmiah dengan mengolah data yang diperoleh dari perusahaan.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian bagi perusahaan dapat digunakan sebagai masukan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas kerja khususnya dalam bidang keuangan.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri atas lima bab yang tersusun secara sistematis. Adapun masing-masing babnya secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori yang mendasari tentang manajemen kredit dan rumus-rumus yang mendukung serta digunakan dalam perhitungan maupun analisis data.

Bab ini berisi teori tentang efektivitas manajemen kredit, teori tentang kredit, manajemen perkreditan, profitabilitas, serta tentang bank.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian untuk skripsi ini dilakukan.

Metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil perhitungan data sesuai dengan teori yang digunakan serta analisa dan hasil.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang berisikan jawaban atas rumusan masalah, serta memberikan saran dari hasil penelitian baik bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Kebijakan Kredit

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Mulyono (2001:25) definisi efektivitas secara umum berarti kemampuan untuk memilih tujuan atau peralatan yang tepat atau dengan kata lain melakukan pekerjaan yang benar untuk mencapai tujuan. Efektivitas tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja suatu organisasi yang artinya sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, dengan demikian efektivitas merupakan alat untuk mengukur tingkat pencapaian suatu tujuan (tingkat dimana tujuan-tujuan tersebut dicapai)

2. Efektivitas Kebijakan Kredit

Penelitian yang akan dibahas dalam peneltian ini adalah tentang kebijakan kredit. Kebijakan Kredit menurut Syamsuddin (2009:256) “Kebijakan kredit adalah pedoman yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan apakah kepada seorang langganan akan diberikan kredit dan kalau diberikan berapa banyak jumlah kredit yang akan diberikan”. Berdasarkan uraian tersebut pada dasarnya efektivitas kebijakan kredit dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk mengikuti ketentuan-ketentuan secara konsisten dan konsekuen untuk dijadikan pedoman dalam menyalurkan kredit sehingga kesepakatan antara bank dengan debitur dapat berjalan dengan

baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan kredit dapat dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai dari adanya pengelolaan kredit telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

B. Kredit

1. Definisi Kredit

Perkreditan merupakan kegiatan yang vital dalam dunia perbankan. Peran kredit ini tercermin dalam alokasi dana bank dan besarnya pendapatan dari portofolio kredit dalam total pendapatan yang diperoleh oleh bank, selain itu fungsi perkreditan pada umumnya memikul resiko besar. “Kegagalan sebuah bank umum biasanya berkaitan dengan permasalahan dalam portofolio kredit dan jarang diakibatkan oleh menyusutnya nilai asset lain sehingga dapat dikatakan bahwa perkreditan merupakan alasan mendasar bagi berdirinya sebuah bank” (Puspoproto, 2004:137). Mulyono (2001:9) menyebutkan bahwa “pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari kata kredit yang berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin “*creditum*” yang berarti kepercayaan atas kebenaran. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan”.

Menurut Sastradipoera (2004:151) kredit dapat didefinisikan dengan lima cara, yaitu:

- a) Kredit dianggap sebagai waktu yang diberikan untuk membayar barang atau jasa yang dijual atas kepercayaan
- b) Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu
- c) Kredit adalah kepercayaan (amanat) yang diberikan berhubungan dengan kekayaan yang diserahkan atas janji pembayaran kelak. Sudah tentu, debitur dan kreditur dapat mengadakan pemufakatan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dengan suatu nilai yang lain, misalnya saham dan obligasi
- d) Kredit adalah dana yang tersimpan dalam perkiraan sebuah bank
- e) Kredit (dan sebaliknya, utang) adalah transaksi yang melalui transaksi itu penguasaan atas sumber-sumber daya diperoleh saat ini sebagai kompensasi kepada pemberi pinjaman. Dalam pengertian ini tersirat bahwa kredit adalah pembayaran yang ditangguhkan (*deffered payment*) yang didalamnya mengandung periode kepercayaan (*period of trust*), mungkin jangka panjang, mungkin juga jangka pendek. Semakin lama suatu periode semakin banyak kemungkinan yang akan terjadi. Untuk itu kreditur harus mempersiapkan diri.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya kredit merupakan suatu penyerahan uang atau tagihan atau dapat juga berupa barang antara pihak bank dengan pihak debitur disertai kesepakatan pelunasan utang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

2. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit akan memberikan kredit apabila ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan si pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

b. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sehingga tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadi musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit, semakin besar resiko tidak tertagih, demikian sebaliknya.

e. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, serta biaya administrasi kredit sebagai keuntungan utama bank (Kasmir, 2011:75).

Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya unsur kredit meliputi kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa.

3. Tujuan dan fungsi Kredit

Menurut Hasibuan (2005:88) penyaluran kredit mempunyai tujuan dan fungsi tertentu. Tujuan utama pemberian kredit antara lain untuk:

- a. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
- b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
- c. Melaksanakan kegiatan operasional bank
- d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
- e. Memperlancar lalulintas pembayaran
- f. Menambah modal kerja perusahaan
- g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Selain pemberian kredit memiliki tujuan, maka penyaluran kredit juga memiliki fungsi. Berikut fungsi kredit menurut Hasibuan (2005:88), yaitu:

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang
- d. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dll)
- e. Meningkatkan produktivitas dana yang ada
- f. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang
- g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
- h. Memperbesar modal kerja perusahaan
- i. Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat
- j. Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis

Berdasarkan uraian tentang fungsi dan tujuan kredit tersebut, pada dasarnya fungsi dan tujuan kredit adalah untuk membantu masyarakat memberikan bantuan dana kepada masyarakat agar dapat mensejahterakan diri sendiri dan masyarakat sekitar.

4. Jenis-jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula jenis kredit yang ada. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Secara umum, menurut Kasmir (2009:109) jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dilihat dari beberapa segi, yaitu:

a. Dilihat dari segi kegunaan

Maksudnya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut, apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

- 1) Kredit investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan
- 2) Kredit modal kerja yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung investasi yang sudah ada.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian kredit apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit ini terdiri dari:

- 1) Kredit produktif, adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu berupa barang maupun jasa.
- 2) Kredit konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
- 3) Kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lama masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis kredit ini terdiri dari:

- 1) Kredit jangka pendek yang memiliki jangka waktu pelunasan kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja
- 2) Kredit jangka menengah merupakan kredit yang masa pelunasannya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk investasi.
- 3) Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan atau manufaktur dan juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Dilihat dari segi jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai jumlah kredit yang diberikan. Jenis kredit ini terdiri atas:

- 1) Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
- 2) Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank bersangkutan.

e. Dilihat dari sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor segi usaha adalah:

- 1) Kredit pertanian yang merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang
- 2) Kredit peternakan merupakan kredit yang diberikan untuk jangka relatif pendek, misalnya peternakan ayam dan kredit jangka panjang seperti peternakan sapi dan kambing
- 3) Kredit industri yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar
- 4) Kredit pertambangan yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas dan tambang minyak
- 5) Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit mahasiswa untuk para mahasiswa yang sedang belajar
- 6) Kredit profesi adalah kredit yang diberikan kepada kalangan para profesional seperti dokter, dosen atau pengacara
- 7) Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya jenis-jenis kredit menurut kasmir dapat dilihat melalui segi kegunaan, tujuan kredit, jangka waktu, jaminan, dan sektor usaha.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Hasibuan (2005:88) yang membedakan jenis kredit berdasarkan tujuan atau kegunaannya, jangka

waktu, macam, sektor perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan.

- a. Berdasarkan tujuan atau kegunaannya
 - 1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya. Kredit ini tidak produktif
 - 2) Kredit modal kerja adalah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini produktif
 - 3) Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu relative lama. Biasanya kredit ini diberikan *grace period* misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain.
- b. Berdasarkan jangka waktu
 - 1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja
 - 2) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun
 - 3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
- c. Berdasarkan macamnya
 - 1) Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kreditnya
 - 2) Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembelinya artinya barang telah diterima, namun pembayarannya kemudian
 - 3) Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual tetapi barang diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka
- d. Berdasarkan sektor perekonomian
 - 1) Kredit pertanian adalah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan dan perikanan
 - 2) Kredit perindustrian adalah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar
 - 3) Kredit pertambangan adalah kredit yang diberikan kepada eksportir atau importer beraneka barang
 - 4) Kredit koperasi adalah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi
 - 5) Kredit profesi adalah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi seperti dokter dan guru.
- e. Berdasarkan agunan atau jaminan
 - 1) Kredit agunan orang adalah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur yang bersangkutan
 - 2) Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek, dan surat-surat berharga

- 3) Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia
- 4) Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi seperti *letter of credit* (L/C)
- f. Berdasarkan golongan ekonomi
 - 1) Golongan ekonomi lemah adalah kredit yang disalurkan kepada pengusaha ekonomi lemah. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp. 600 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya
 - 2) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar
- g. Berdasarkan penarikan dan pelunasan
 - 1) Kredit rekening koran adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai kebutuhan, penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan. Pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja, bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening koran baru dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.
 - 2) Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya jenis kredit dapat dikelompokkan menurut tujuan atau kegunaannya, jangka waktu, macamnya, jaminan, sektor perekonomian, agunan atau jaminan, golongan ekonomi, dan menurut penarikan dan pelunasannya.

C. Kebijakan Kredit

Kebijakan kredit merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menjual produk kredit. Bagi beberapa bank, kredit merupakan sumber penerimaan terbesar. Menurut Syamsuddin (2009:256) “Kebijaksanaan kredit adalah merupakan pedoman yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan apakah kepada seorang langganan akan diberikan kredit dan kalau diberikan berapa banyak jumlah kredit yang akan diberikan”. Menurut Suhardjono (2007:100)

Kebijakan perkreditan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok tentang prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan pemberian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, penyelesaian kredit bermasalah.

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan

Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam proses pemberian kredit yang dilakukan bank kepada nasabahnya. Menurut Suhardjono (2007: 101) dalam kebijakan kredit pemberian kredit sekurang-kurangnya harus ditetapkan tata cara pemberian kredit yang sehat, pengaturan pemberian kredit kepada pihak-pihak terkait dengan bank dan debitur besar, serta jenis-jenis usaha yang dilarang dan dihindari untuk dibiayai dengan kredit bank.

a. Ketentuan-ketentuan bank Indonesia berkenaan dengan prinsip kehati-hatian bank

Bank Indonesia banyak menerbitkan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati sebagai upaya untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya kebangkrutan bank. ketentuan-ketentuan yang menjadi bagian dari kebijakan perkreditan bank yaitu:

1) Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)

BMPK adalah limit atau batas maksimal kredit yang boleh diberikan suatu bank kepada setiap debitur individual dan atau debitur terkait dengan kelompok usaha.

2) Rasio kredit terhadap simpanan atau *loan to deposit ratio* (LDR)

Bank Indonesia juga memberikan pembatasan jumlah kredit yang disalurkan secara keseluruhan melalui penetapan rasio/perbandingan

antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan dana pihak ketiga (masyarakat) yang berhasil dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Perbandingan tersebut bisa dikenal dengan *Loan To Deposit Ratio* (LDR). Ini berarti jumlah kredit terhadap bank pihak ketiga tidak boleh melebihi ketentuan (Firdaus dan Ariyanti, 2009:45).

3) Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR)

Ketentuan yang secara tidak langsung membatasi jumlah kredit yang diberikan adalah rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009 : 45) “CAR adalah ketentuan permodalan yaitu rasio minimum perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Ketentuan yang berlaku bagi bank umum non devisa, CAR sekurang-kurangnya atau minimum 8%.”

2. Organisasi dan manajemen perkreditan.

Untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian internal mulai dari tahap awal proses kegiatan pemberian perkreditan sampai kredit tersebut lunas, maka bank harus menetapkan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat bank yang terkait dalam proses pemberian kredit seperti komisaris, direksi, pejabat perkreditan lainnya dan atau satuan-satuan kerja perkreditan.

3. Kebijakan persetujuan pemberian kredit

Dalam membuat pedoman kebijakan persetujuan pemberian kredit sekurang-kurangnya mencakup antara lain konsep hubungan total pemohon kredit dengan bank, penetapan batas wewenang putusan kredit dari setiap pejabat, tanggung jawab pemutus kredit, pedoman proses persetujuan kredit,

pembuatan perjanjian kredit dan persetujuan pencairan. Kebijakan pemberian kredit juga meliputi analisa pemberian kredit yang meliputi 5C dan 7P yaitu:

a. *Character*

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup, keadaan keluarga hobi, dan sosial standingnya..

b. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

c. *Capital*

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya.

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk untuk dimasa datang sesuai sektor masing-masing. Prospek usaha dimasa mendatang sebaiknya juga dilihat.

Sedangkan prinsip 7P adalah seperti berikut:

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas maupun karakternya

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek yang baik atau tidak.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank, namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi (Kasmir, 2011:91).

Selain penilaian melalui 5C, dan 7C, terdapat prinsip 3R yang meliputi:

a. *Return*

Merupakan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit bank. Return dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

b. *Repayment*

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali (*repayment capacity*), dan apakah kredit harus diangsur atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

c. *Risk bearing ability*

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung resiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. (firdaus dan ariyanti, 2009:89).

4. Dokumentasi dan administrasi kredit

Dokumentasi kredit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemberian kredit dan merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian kredit. Dokumen kredit harus memenuhi kriteria lengkap, sistematis, efisien dan informatif. Dokumen kredit yang dipersyaratkan oleh bank sekurang-kurangnya harus ada:

- a. Dokumen yang berkaitan dengan identitas atau legalitas nasabah dan usahanya
- b. Dokumen yang berkaitan dengan permohonan, analisa dan evaluasi kredit, rekomendasi, dan persetujuan kredit
- c. Dokumen yang berkaitan dengan perjanjian dan pencairan kredit
- d. Dokumen yang berkaitan dengan pemilikan barang jaminan dan pengikatnya
- e. Dokumen yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan dan penyelamatan atau penyelesaian kredit (Suhardjono, 2007:111).

5. Pengawasan kredit

Pengawasan kredit diperlukan sebagai upaya untuk mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari nasabah. Menurut Hasibuan (2004: 105) tujuan pengendalian antara lain sebagai berikut:

- a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
- d. Mengevaluai apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan kerayawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- f. Mengetahui posisi presentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
- g. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit.

Dalam rangka pengendalian kredit salah satu langkah yang perlu diambil adalah dengan mengkategorikan kredit berdasarkan kelancarannya karena itu kredit-kredit yang ada harus dikumpulkan dan disusun kriteria-kriteria tentang masing-masing keadaannya.

6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Hampir setiap bank mengalami kredit macet atau nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

- a. *Rescheduling*
Rescheduling maksudnya bank memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit atau bisa juga memperpanjang waktu angsuran.
- b. *Reconditioning*
Reconditioning mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai batas waktu tertentu, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga

c. *Restructuring*

Teknik *restructuring* dapat dilakukan dengan menambah jumlah kredit atau menambah equity dengan cara menyetor uang tunai.

d. Kombinasi

Kombinasi merupakan cara menyelesaikan kredit macet dengan mengombinasikan dari ketiga jenis metode diatas, misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

e. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutangnya (Kasmir, 2011: 109).

D. Profitabilitas

Setiap kegiatan bisnis yang dijalankan baik secara perorangan maupun berkelompok bertujuan untuk menyejahterakan pemilik atau menambah nilai perusahaan dengan meningkatkan profitabilitas atau mendapatkan laba yang maksimal. Harapan untuk meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan bukanlah suatu pekerjaan yang gampang tetapi memerlukan perhitungan yang cermat dan teliti dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perusahaan baik faktor intern maupun faktor ekstern.

Menurut Mahmoeddin (2001:20) profitabilitas adalah “Kemampuan suatu bank untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan yang diperoleh bank sebagian besar bersumber pada kredit yang dipinjamkan”. Menurut Abdullah (2005:124) profitabilitas merupakan “Kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank”. Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya profitabilitas bank adalah presentase laba yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bank dalam memperoleh laba melalui operasi bank.

E. Bank

1. Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang berarti tempat penukaran uang. Pengertian bank menurut undang-undang negara Republik Indonesia nomer 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pandia (2004:10) menyebutkan bahwa “Bank merupakan suatu badan usaha yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pemberian kredit dilakukan dengan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral”. Definisi lain yang dinyatakan oleh Abdullah (2005:17) yaitu “Bank adalah suatu lembaga atau badan usaha yang kegiatan pokoknya adalah menerima simpanan dan kemudian menyalurkan kredit kepada masyarakat dan disamping itu juga memberikan jasa-jasa pelayanan keuangan kepada masyarakat”. Berdasarkan pengertian tersebut pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk jasa-jasa perbankan lainnya.

2. Fungsi Bank

Bank memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.

Menurut Triandaru (2006:9) “Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*”.

Secara lebih spesifik fungsi bank adalah sebagai:

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

b. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Kegiatan bank berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi merupakan kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of service*

Bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat, disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. (Triandaru, 2006:9)

Hasibuan (2005:3) menyebutkan bahwa bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank adalah:

- a. Pengumpul dana dari surplus spending unit dan penyalur kredit kepada defisit spending unit
- b. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat
- c. Pelaksana penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C
- d. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi.

Berdasarkan uraian diatas pada dasarnya bank memiliki fungsi sebagai *financial intermediary* yang meliputi *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service* serta membantu pertumbuhan ekonomi.

3. Jenis Bank

Berikut ini adalah jenis-jenis bank yang ada menurut Kasmir (2009:19):

a. Jenis bank berdasarkan fungsinya terdiri atas:

1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

b. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya

1) Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Ada pula bank pemerintah daerah (BPD) yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh pemda masing-masing tingkatan.

2) Bank Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannyapun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

3) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin)

4) Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

5) Bank Milik Asing

Bank asing adalah bank-bank umum swasta yang mempunyai induk di Negara lain. Kepemilikannyapun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

c. Jenis bank berdasarkan segi statusnya

1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Jenis bank berdasarkan cara menentukan harga

1) Bank Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

a) Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito, begitu pula dengan produk pinjamannya (kredit)

b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.

2) Bank Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun diluar negeri terutama di negara-negara timur tengah seperti Mesir atau Pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berprinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya jenis bank dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, yaitu:

- a. Berdasarkan fungsinya yang terdiri dari bank sentral dan bank umum
- b. Berdasarkan kepemilikannya yang terdiri dari bank milik pemerintah, bank swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik campuran dan bank milik asing
- c. Berdasarkan segi statusnya yang terdiri dari bank devisa, dan bank non devisa
- d. Berdasarkan cara menentukan harga yang terdiri dari bank konvensional dan bank syariah.

4. Sumber Dana Bank

Salah satu kendala bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kebutuhannya adalah masalah kebutuhan dana. Pentingnya dana membuat setiap perusahaan berusaha keras untuk mencari sumber-sumber dana yang tersedia, termasuk bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Sumber-sumber dana bank juga tidak lepas dari bidang keuangan. Menurut Kasmir (2010:65) sumber dana bank dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

- a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri atau pihak pertama. Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Secara garis besar dapat disimpulkan pencairan dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari:
 - 1) Setoran modal dari pemegang saham

Modal dari pemegang saham artinya jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Pada umumnya modal setoran pertama dari pemilik bank sebagian digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor dan promosi kepada masyarakat luas.

2) Cadangan-cadangan bank

Cadangan-cadangan bank yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan diperlukan untuk menutup timbulnya resiko dikemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar apabila bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu meningkatkan labanya.

3) Laba bank yang belum dibagi

Laba bank yang belum dibagi merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam kelembaga lain. Kerugiannya adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar memerlukan waktu yang relatif lebih lama

b. Dana yang bersumber dari masyarakat luas atau dana pihak kedua.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah dibandingkan dengan sumber lainnya. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal dibandingkan dari dana sendiri.

Secara umum kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat luas ini dibagi kedalam tiga jenis, yaitu:

1) Simpanan Giro

Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan

2) Simpanan Tabungan

Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

3) Simpanan Deposito

Simpanan deposito adalah simpanan yang mengandung unsur jangka waktu lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.

Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito, sedangkan simpanan tabungan dan simpanan deposito disebut dana mahal, hal ini disebabkan bunga yang dibayar kepada pemegangnya relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa giro.

c. Dana yang bersumber dari lembaga lain atau pihak ketiga
Sumber dana yang ketiga ini merupakan dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

- 1) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia
- 2) Pinjaman antar bank
- 3) Pinjaman dari bank-bank luar negeri
- 4) Surat berharga pasar uang (SBPU)

Berdasarkan uraian tersebut pada dasarnya sumber dana bank berasal dari dana yang berasal dari bank itu sendiri atau yang biasa disebut pihak pertama, dana yang berasal dari masyarakat luas atau pihak kedua, serta dana yang berasal dari lembaga lain atau yang disebut pihak ketiga.

F. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

1. Pengertian BPR

Bank perkreditan rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan mikro, kecil dan menengah. BPR menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan balas jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

2. Kegiatan BPR

Kegiatan yang dilakukan oleh BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana

BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Berikut ini adalah kegiatan BPR:

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi.

G. Analisis Rasio Keuangan Bank

1. Prinsip Kehati-hatian Pemberian Kredit

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dapat dinilai menggunakan perhitungan sebagai berikut:

a. *Loan to deposit ratio* (LDR)

Loan to deposit ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya *loan to deposit ratio* menurut peraturan pemerintah maksimum 110%. Dalam menghitung *loan to deposit ratio* bank, secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2011 : 290).

b. Rasio Kecukupan Modal atau *capital adequacy ratio* (CAR)

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009 : 45) CAR adalah ketentuan permodalan yaitu rasio minimum perbandingan antara modal dengan

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Dalam menghitung CAR, secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih., dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid. Berikut ini beberapa perhitungan yang digunakan untuk menghitung rasio likuiditas, yaitu:

a) *Quick Ratio*

Quick ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposito) dengan harta yang dimiliki oleh suatu bank. Dalam menghitung *quick ratio* bank, secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Assets}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2011 : 286).

Cash asset yang dimaksud adalah aktiva setara kas yang dimiliki oleh bank. *Cash asset* dapat dapat berupa kas yang dimiliki bank, giro, serta

aktiva likuid dalam valuta asing. Sedangkan total deposit merupakan deposito simpanan yang dimiliki oleh bank.

b) *Banking ratio*

Bank ratio bertujuan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditas bank semakin rendah karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil. Dalam menghitung *banking ratio* bank, secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit}} \times 100 \%$$

(Kasmir, 2011 : 287).

3. Rasio Profitabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang diperoleh oleh bank yang bersangkutan.

a) *Gross Profit Margin* (GPM)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui presentase laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. Dalam menghitung *gross profit margin* bank, secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{GPM} = \frac{\text{Operating Income} - \text{Operating Expense}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2011 : 297).

b) *Net Profit Margin*

Net Profit Margin merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan *net income* dari kegiatan operasi pokoknya. Dalam menghitung *net profit margin* bank, secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2011 : 298).

c) *Return on Equity Capital (ROE)*

ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola *capital* yang ada untuk mendapatkan *net income*. Dalam menghitung *return on equity capital* bank, secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equity Capital}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2011 : 298).

d) *Net Income Total Assets*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisien secara *overall*. Dalam menghitung *net income total assets* bank, secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Income Total Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2011 : 299).

e) *Rate Return on Loans*

Analisis ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditannya. Dalam menghitung *rate return on loans* bank, secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Rate Return on Loans} = \frac{\text{Interest Income}}{\text{Total Loans}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2011 : 300)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini akan menggambarkan atau mendeskripsikan sejumlah dari obyek yang diteliti secara sistematis, aktual dan akurat. Jenis penelitian deskriptif menurut Nazir (2005:54) adalah “Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini hanya akan menggambarkan keadaan perusahaan melalui data yang dihasilkan dari penyelidikan atau keterangan-keterangan, dengan memberikan gambaran menurut apa yang ada dalam kenyataan atau didalam praktek. Gambaran tersebut nantinya berkaitan dengan berbagai kebijaksanaan pengelolaan manajemen kredit di dalam upaya meningkatkan profitabilitas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT BPR Surya Artha Utama Surabaya yang terletak di Jl. Walikota Mustajab No. 84 Surabaya. Pemilihan lokasi ini karena BPR Surya Artha Utama merupakan salah satu lembaga keuangan yang berkonsentrasi pada pemberian kredit bagi masyarakat golongan ekonomi lemah

di perkotaan dan memiliki kredit bermasalah pada tahun 2010 sehingga perolehan profitabilitas mengalami penurunan.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian digunakan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini maka penelitian dibatasi pada:

1. Pengukuran efektivitas manajemen kredit dengan menghitung menggunakan prinsip kehati-hatian, rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Prinsip kehati-hatian meliputi *loan to deposit ratio* (LDR) dan *capital adequacy ratio* (CAR). Rasio likuiditas meliputi *quick ratio* dan *banking ratio*. Serta rasio profitabilitas meliputi *gross profit margin*, *net profit margin*, *return on equity capital*, *net income total assets* dan *rate return on loans*.
2. Kebijakan kredit yang telah diterapkan pada PT BPR Surya Artha Utama Surabaya yang meliputi prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan pemberian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, penyelesaian kredit bermasalah.

D. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Sumber data primer menurut Sugiyono (2011:225) “Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari

secara langsung dengan pihak yang terkait. Data primer yang digunakan berupa:

- a. Informasi tentang perusahaan
 - b. Proses pemberian kredit
 - c. Kendala yang dihadapi bank dalam menyalurkan kreditnya.
2. Sumber data skunder menurut Sugiyono (2011:225) “Sumber data skunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan (laporan rugi laba, neraca) dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2011: 224) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melihat langsung dan mempelajari laporan, dokumen, arsip, serta catatan-catatan yang ada pada perusahaan sesuai dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen struktur organisasi perusahaan, laporan neraca keuangan, laporan rugi laba 3 tahun terakhir, dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data atau teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait. Wawancara dilakukan pada bagian keuangan perusahaan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh dan mengelola informasi dari para responden. Instrumen dirancang untuk satu tujuan dan tidak bias digunakan pada penelitian lain.

1. Pedoman Dokumentasi

Pedoman Dokumentasi merupakan instrumen penelitian berupa dokumen atau catatan yang berisi data pendukung penelitian.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden agar wawancara tidak melenceng dari topik penelitian.

G. Metode Analisis

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan profitabilitas bank dengan cara melihat kondisi keuangan maupun efektivitas manajemen kredit yang diterapkan PT BPR Surya Artha Utama. Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan peneliti untuk mengetahui efektivitas manajemen kredit terhadap profitabilitas adalah:

1. Melakukan pengumpulan data berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan rugi laba.
2. Menghitung rasio keuangan bank tahun 2008-2010 yang berupa:
 - a. Pengukuran kebijakan pemberian kredit

- 1) *Loan to deposit ratio*

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

- 2) *Capital adequacy ratio (CAR)*

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

- b. Rasio likuiditas

- 1) *Quick Ratio*

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Assets}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

- 2) *Banking ratio*

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

- c. Rasio profitabilitas

- 1) *Gross Profit Margin (GPM)*

$$\text{GPM} = \frac{\text{Operating Income} - \text{Operating Expense}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

- 2) *Net Profit Margin*

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

3) *Return on Equity Capital (ROE)*

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equity Capital}} \times 100\%$$

3) *Net Income Total Assets*

$$\text{Net Income Total Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

4) *Rate Return on Loans*

$$\text{Rate Return on Loans} = \frac{\text{Interest Income}}{\text{Total Loans}} \times 100\%$$

3. Melakukan analisis tentang kebijaksanaan kredit yang telah dilakukan bank.
4. Mengambil kesimpulan berdasarkan analisis dan perhitungan yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan

PT BPR Surya Artha Utama (bank) didirikan sesuai dengan akta No. 21 tanggal 21 Agustus 2004 oleh notaris Wachid Hasyim, S.H di Surabaya. Bank didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan usahanya sebagai bank perkrediran rakyat (BPR) dengan melaksanakan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, member kredit pada pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan. PT BPR Surya Artha Utama berada di Jl. Walikota Mustajab No. 84 Genteng Surabaya, Jawa Timur. Bank memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 23 Mei 2006. Tanggal 29 April 2010 bank melakukan ekspansi perluasan pemasaran kedaerah Manukan Surabaya.

2. Lokasi Perusahaan

PT BPR Surya Artha Utama berada di Jl. Walikota Mustajab No. 84 Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Lokasi perusahaan berada di lokasi yang sangat strategis dan berada di pusat kota Surabaya yang juga merupakan pusat bisnis di Surabaya sehingga mudah diketahui dan dijangkau konsumen yang ingin mendapatkan kredit.



3. Visi, Misi, dan Tujuan

Setiap usaha yang didirikan harus mempunyai visi, misi serta tujuan yang jelas agar perusahaan dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

a. Visi

Menjadi BPR yang sehat, terkemuka, profesional, dan memberi layanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya serta memberikan nilai tambah bagi stakeholder

b. Misi

- 1) Melayani kebutuhan pembiayaan usaha mikro untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat dan pembiayaan kebutuhan individu dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme
- 2) Menyelenggarakan manajemen perbankan sesuai prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* untuk memperoleh hasil yang maksimal.

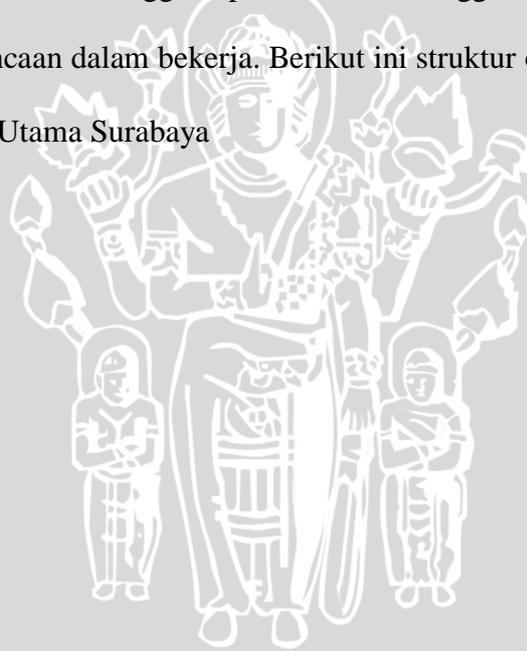
c. Tujuan

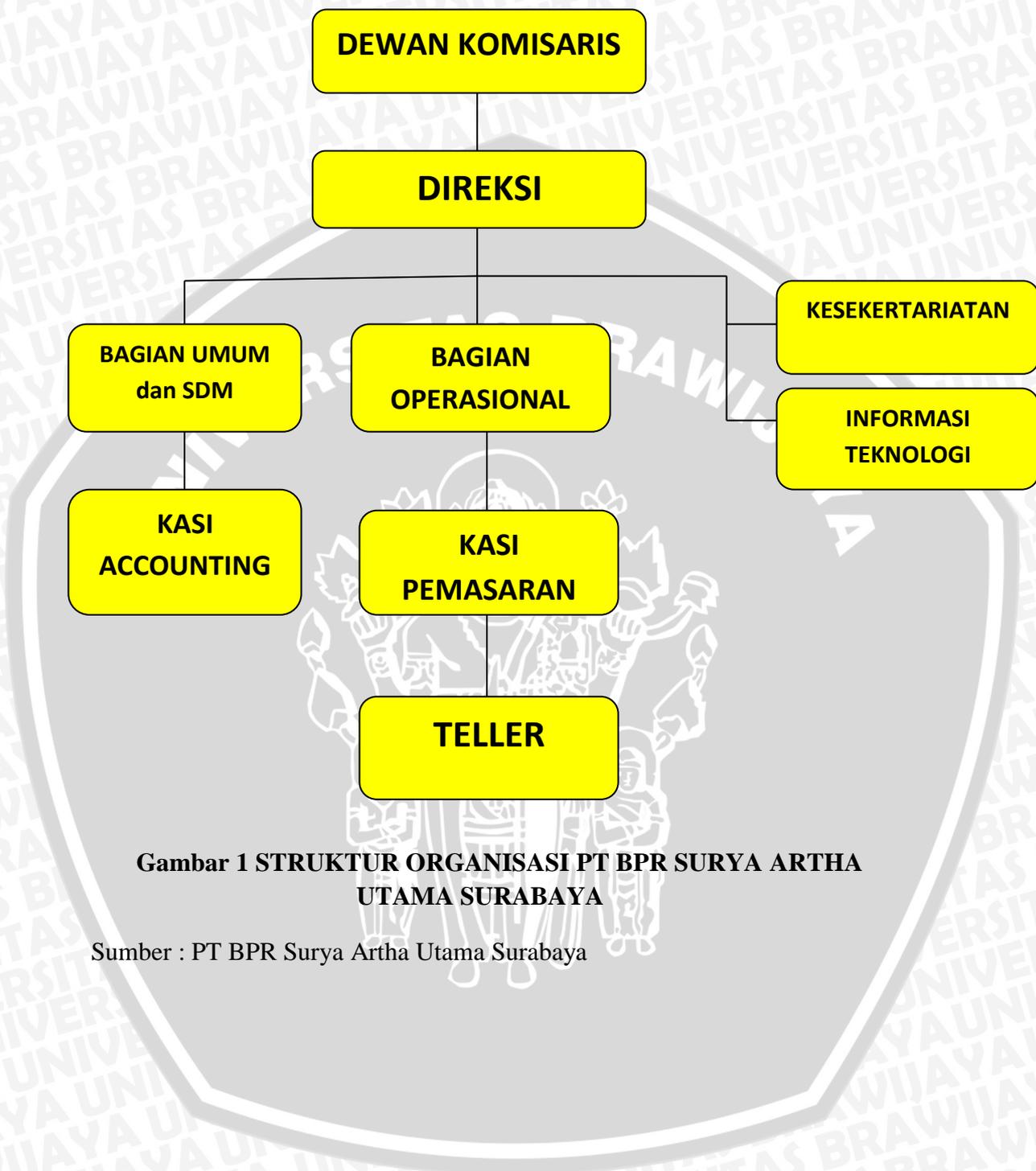
- 1) Menjalankan usaha perbankan sesuai dengan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998
- 2) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah

- 3) Membantu pengembangan dan pertumbuhan UKM dengan menyalurkan kredit komersial
- 4) Memberikan pembiayaan kepada individu-individu untuk memenuhi kebutuhannya.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi berfungsi sebagai pembagi tugas dan wewenang untuk seluruh anggota perusahaan sehingga akan menimbulkan efisiensi dan kelancaran dalam bekerja. Berikut ini struktur organisasi pada PT BPR Surya Artha Utama Surabaya





Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI PT BPR SURYA ARTHA UTAMA SURABAYA

Sumber : PT BPR Surya Artha Utama Surabaya

5. Aktivitas Personalia

a. Komisaris.

Tugas dewan komisaris pada PT BPR Surya Artha Utama adalah:

- 1) Mengesahkan rencana kerja tahunan yang diajukan oleh direksi
- 2) Mengangkat dan memberhentikan direksi serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan direksi
- 3) Melakukan penilaian atau analisis atas laporan-laporan yang disampaikan direksi.

b. Staf Direksi

Staf direksi pada PT BPR Surya Artha Utama memiliki 3 tugas pokok yaitu:

- 1) Urusan perencanaan dan pengawasan

Tugas urusan perencanaan dan pengawasan yang dilakukan staf direksi meliputi:

- a) Menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek beserta upaya yang ditempuh dalam merealisasikannya, termasuk merencanakan pengembangan organisasi
- b) Melaksanakan pengawasan maupun pengendalian aktivitas bank dari segala penyimpangan, melakukan kontrol efisiensi dan efektivitas usaha serta mendorong dipatuhinya perundang-undangan

- 2) Urusan teknologi informasi

Uraian tugas teknologi informasi adalah:

- a) Menyelenggarakan dan mengelola serta mengevaluasi tentang kegiatan teknologi informasi dengan menyesuaikan kebutuhan perusahaan
 - b) Membuat analisa perhitungan kemungkinan terjadinya resiko atas perubahan-perubahan penyesuaian teknologi yang ada
 - c) Melakukan upaya pengamanan data dan pemeliharaan teknologi system informasi yang ada
 - d) Melakukan upaya pengembangan teknologi informasi
- 3) Urusan kesekretariatan

Uraian tugas urusan kesekretariatan adalah:

- a) Mengelola kegiatan administrasi surat-surat atau dokumen
 - b) Mengelola kepustakaan bank dengan menggunakan tata laksana dan sistem pengelolaan yang lazim digunakan
 - c) Mengendalikan, memelihara dan menjamin penyebaran surat-surat dan dokumen perusahaan secara tepat dan terarah
 - d) Menyajikan kliping, ringkasan dan abstraksi media cetak dan serta mendistribusikan ke segenap unit organisasi
- c. Bagian operasional
- 1) Mengkoordinasikan sejak upaya penggalan dana, mengelola dan menyalurkan kredit, mengendalikan operasional bank yang terkait dengan pelaksanaan segala urusan kas dan data akuntansi bank

- 2) Penerus perintah dan/atau pendelegasian wewenang dari direksi kepada seksi-seksi dan seluruh SDM yang berada dibawah kendali dan tanggung jawabnya
 - 3) Melaksanakan administrasi analisa sumber dana atau penggunaan dana bank dengan maksud menjaga tingkat likuiditas dan rentabilitas
 - 4) Mengadministrasikan saham
- d. Kasi pemasaran
- 1) Menyalurkan dana dalam bentuk perkreditan dalam batas wewenang bagian operasional
 - 2) Mengelola dan bertanggung jawab terhadap uang tunai maupun dana antar bank aktiva
 - 3) Mengadakan penilaian permohonan kredit
 - 4) Mengadakan supervisi dan penagihan atas kredit yang telah direalisasikan
 - 5) Mengelenggarakan administrasi nasabah tabungan dan deposito maupun debitur
 - 6) Menangani masalah kredit bermasalah dan mengupayakan langkah penyelamatan
 - 7) Memantau aktivitas pemberian kredit
 - 8) Membuat laporan sesuai bidang tugas

- e. Teller atau petugas kas
 - 1) Melayani pembayaran dan penyetoran
 - 2) Menyediakan uang kas untuk keperluan operasional sesuai kebutuhan dan persetujuan kasi pemasaran
 - 3) Mengambil dan menyetorkan uang kas bank yang ditunjukkan dan disetujui kasi pemasaran untuk keperluan penyediaan uang kas
 - 4) Membuat laporan keadaan uang kas setiap hari
 - 5) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam melakukan tugas
 - 6) Bertanggungjawab mengawasi dan mengendalikan dana dibawah wewenangnya
- f. Bagian umum, akuntansi dan SDM

Mempunyai fungsi pokok melaksanakan administrasi kepegawaian yang ditetapkan manajemen, akuntansi, serta melaksanakan pelayanan bidang kerumahtanggaan dan pengadaan barang dan jasa.

6. Ketenagakerjaan

PT BPR Surya Artha Utama Surabaya memiliki 19 karyawan yang memiliki waktu dan jam kerja sebagai berikut:

Hari kerja : Senin – Jum'at

Jam kerja : 07.45 – 17.00

7. Kegiatan Usaha

Jenis kegiatan perbankan yang dilakukan oleh PT BPR Surya Artha Utama Surabaya adalah memberikan jasa perbankan yaitu berupa simpanan dan menyalurkan kredit.

a. Simpanan

Jasa simpanan yang disediakan oleh PT BPR Surya Artha Utama Surabaya adalah:

- 1) Tabungan
- 2) Deposito berjangka

Persyaratan umum agar nasabah bisa memiliki rekening tabungan maupun deposito berjangka adalah:

- 1) Mengisi formulir yang disediakan oleh bank
- 2) Menunjukkan KTP asli dan menyerahkan *fotocopy* KTP kepada bank.

b. Penyaluran kredit

Jasa kredit yang diberikan oleh PT BPR Surya Artha Utama Surabaya adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit khusus (Kredit Kresna)

Kredit kresna merupakan pemberian kredit yang dilakukan oleh PT BPR Surya Artha Utama Surabaya untuk para pegawai negeri sipil (PNS). Dokumen yang digunakan untuk mendapatkan kredit ini adalah:

- a) Rekomendasi dari instansi yang bersangkutan
- b) Pernyataan dan kuasa pemohon,serta persetujuan suami/istri pemohon
- c) Surat keterangan gaji
- d) Surat pernyataan bendahara gaji
- e) *Copy* surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil
- f) Surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil (asli) sebagai jaminan
- g) *Copy* kartu pegawai dilegalisir
- h) *Copy* KTP calon debitur, KTP suami/istri, dan KSK

2) Kredit Umum

Kredit Umum merupakan kredit yang diberikan PT BPR Surya Artha Utama Surabaya untuk masyarakat luas. Kredit umum meliputi kredit modal kerja dan investasi. Dokumen yang digunakan untuk mendapat kredit ini adalah:

- a) *Copy* KTP debitur, KTP suami/istri, KSK, dan surat nikah
- b) *Copy* legalitas usaha
- c) *Copy* surat jaminan
- d) Nomor gesekan rangka dan mesin untuk sepeda motor/mobil.

B. Penyajian Data

Penyajian data pada bab 4 ini akan menampilkan data yang diperlukan untuk menganalisis tentang kebijakan kredit serta laporan keuangan PT BPR Surya Artha Utama Surabaya.

1. Data Keuangan

a. Data Jumlah Pemberian Kredit

**Tabel 2 Realisasi Kredit PT BPR Surya Artha Utama Surabaya
Tahun 2008-2010**

(dalam rupiah)

Tahun	2008	2009	2010
Keterangan			
Modal Kerja	661.121.570	757.565.000	1.369.407.000
Investasi	829.058.053	786.913.000	2.146.751.000
Konsumsi	19.286.243.637	25.018.169.000	27.115.916.000
Jumlah	20.776.423.260	26.562.648.000	30.632.073.000

Sumber: PT BPR Surya Artha Utama Surabaya

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 tersebut, pada dasarnya jumlah pemberian kredit PT BPR Surya Artha Utama Surabaya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan Pemberian kredit yang terbesar terjadi pada pemberian kredit jenis konsumsi.

b. Data Kolektibilitas Kredit

Tabel 3 Data Kolektibilitas PT BPR Surya Artha Utama Surabaya Tahun 2010

(dalam rupiah)

Jenis Kredit	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Modal Kerja	1.369.406.000	-	-	-
Investasi	2.146.750.000	-	-	-
Konsumsi	26.842.824.000	63.835.000	74.629.000	
Jumlah	30.358.980.000	63.835.000	74.629.000	

Sumber: PT BPR Surya Artha Utama Surabaya

Berdasarkan data kolektibilitas tabel 1 dan tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 dan 2009 bank menunjukkan kinerja yang sangat baik karena kredit yang diberikan oleh bank tidak ada yang mengalami masalah, namun berbeda pada tahun 2010. Tahun 2010 bank gagal mempertahankan kinerjanya, pada tahun 2010 bank memiliki kredit bermasalah pada jenis kredit konsumsi. *Non performing loans* PT BPR Surya Artha Utama Surabaya pada tahun 2010 sebesar 0,45%. Standar *non performing loans* (NPL) maksimal yang diterapkan BI adalah 5%. NPL pada tahun 2010 sebesar 0,89% dapat dikatak baik, namun bila bank tidak dapat memperbaiki kinerja dalam memberikan kredit, NPL bank akan terus menurun dan akan mempengaruhi laba yang akan dihasilkan bank.

c. Laporan Keuangan Neraca dan Rugi Laba Bank

Laporan keuangan perusahaan berupa neraca dan laporan rugi-laba tahun 2008-2010 adalah sebagai berikut:



**Tabel 4 Laporan Neraca PT BPR Surya Artha Utama Surabaya
31 Desember 2008**

(dalam rupiah)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2008
	Aktiva	
1	Kas	576.670.430
2	Sertifikat Bank Indonesia	0
3	Antarbank aktiva	
	a. Pada bank umum	1.990.441.592
	b. Pada BPR	50.000.000
4	Kredit yang diberikan	
	a. Pihak terkait	85.833.268
	b. Pihak tidak terkait	20.690.589.992
5	Penyisihan penghapusan aktiva produktif	(114.082.613)
6	Aktiva dalam valuta asing	0
7	Aktiva tetap dan inventaris	
	a. Tanah dan gedung	0
	b. Akumulasi penyusutan gedung	0
	c. Inventaris	783.086.450
	d. Akumulasi penyusutan inventaris	(248.922.298)
8	Aktiva lain-lain	382.612.220
	Jumlah aktiva	24.196.229.041
	Passiva	
1	Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar	539.086.094
2	Tabungan	
	a. Pihak terkait	143.903.380
	b. Pihak tidak terkait	4.557.810.896
3	Deposito berjangka	
	a. Pihak terkait	253.585.623
	b. Pihak tidak terkait	5.344.552.119
4	Kewajiban kepada Bank Indonesia	0
5	Antarbank pasiva	9.936.846.456
6	Rupa-rupa pasiva	98.792459
7	Ekuitas	
	a. Modal dasar	10.000.000.000
	b. Modal belum disetor	(7.350.000.000)
	c. Cadangan umum	33.896.583
	d. Cadangan tujuan	33.896.583
	e. Laba yang ditahan	0
	f. Saldo laba (rugi) tahun berjalan	603.858.848
	Jumlah pasiva	24.196.229.041

Sumber : PT BPR Surya Artha Utama Surabaya

Tabel 5 Laporan Neraca PT BPR Surya Artha Utama Surabaya
31 Desember 2009

(dalam rupiah)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2009
	Aktiva	
1	Kas	120.969.000
2	Sertifikat Bank Indonesia	0
3	Antarbank aktiva	
	a. Pada bank umum	1.985.094.000
	b. Pada BPR	123.389.000
4	Kredit yang diberikan	
	a. Pihak terkait	39.849.000
	b. Pihak tidak terkait	26.522.799.000
5	Penyisihan penghapusan aktiva produktif	(136.820.000)
6	Aktiva dalam valuta asing	0
7	Aktiva tetap dan inventaris	
	a. Tanah dan gedung	0
	b. Akumulasi penyusutan gedung	0
	c. Inventaris	844.884.000
	d. Akumulasi penyusutan inventaris	(393.945.000)
8	Aktiva lain-lain	359.373.000
	Jumlah aktiva	29.465.592.000
	Passiva	
1	Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar	342.492.000
2	Tabungan	
	a. Pihak terkait	881.136.000
	b. Pihak tidak terkait	3.352.607.000
3	Deposito berjangka	
	a. Pihak terkait	1.231.662.000
	b. Pihak tidak terkait	5.887.195.000
4	Kewajiban kepada Bank Indonesia	0
5	Antarbank pasiva	13.342.286.000
6	Rupa-rupa pasiva	190.043.000
7	Ekuitas	
	a. Modal dasar	10.000.000.000
	b. Modal belum disetor	(7.350.000.000)
	c. Cadangan umum	530.000.000
	d. Cadangan tujuan	57.581.000
	e. Laba yang ditahan	0
	f. Saldo laba (rugi) tahun berjalan	1.000.590.000
	Jumlah pasiva	29.465.592.000

Sumber : PT BPR Surya Artha Utama Surabaya

Tabel 6 Laporan Neraca PT BPR Surya Artha Utama Surabaya
31 Desember 2010

(dalam rupiah)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2010
	Aktiva	
1	Kas	386.876.000
2	Sertifikat Bank Indonesia	0
3	Antarbank aktiva	
	a. Pada bank umum	2.150.285.000
	b. Pada BPR	630.767.000
4	Kredit yang diberikan	
	a. Pihak terkait	31.162.000
	b. Pihak tidak terkait	30.600.911.000
5	Penyisihan penghapusan aktiva produktif	(573.312.000)
6	Aktiva dalam valuta asing	0
7	Aktiva tetap dan inventaris	
	a. Tanah dan gedung	0
	b. Akumulasi penyusutan gedung	0
	c. Inventaris	851.491.000
	d. Akumulasi penyusutan inventaris	(495.480.000)
8	Aktiva lain-lain	690.178.000
	Jumlah aktiva	34.272.878.000
	Passiva	
1	Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar	472.492.000
2	Tabungan	
	a. Pihak terkait	740.856.000
	b. Pihak tidak terkait	4.465.105.000
3	Deposito berjangka	
	a. Pihak terkait	75.000.000
	b. Pihak tidak terkait	11.954.512.000
4	Kewajiban kepada Bank Indonesia	0
5	Antarbank pasiva	11.614.947.000
6	Rupa-rupa pasiva	721.649.000
7	Ekuitas	
	a. Modal dasar	10.000.000.000
	b. Modal belum disetor	7.350.000.000
	c. Cadangan umum	730.118.000
	d. Cadangan tujuan	157.640.000
	e. Laba yang ditahan	0
	f. Saldo laba (rugi) tahun berjalan	690.557.000
	Jumlah pasiva	34.626.368.000

Sumber : PT BPR Surya Artha Utama Surabaya

**Tabel 7 Laporan Laba Rugi PT BPR Surya Artha Utama Surabaya
31 Desember 2008**

(dalam rupiah)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2008
1	Pendapatan Operasional	
	a. Bunga	4.071.176.001
	b. Provisi dan komisi	351.010.575
	c. Lainnya	101.274.397
2	Jumlah pendapatan operasional	4.523.460.973
3	Pendapatan non operasional	71.324.173
4	Jumlah pendapatan	4.594.785.146
5	Beban operasional	
	a. Beban bunga	1.599.682.807
	b. Beban administrasi dan umum	1.166.522.209
	c. Beban personalia	833.178.624
	d. Penyisihan aktiva produktif	40.069.232
	e. Beban operasional lainnya	61.497.750
6	Jumlah beban operasional	3.700.950.622
7	Beban non operasional	35.351.976
8	Jumlah beban	3.674.804.848
9	Laba/rugi sebelum pajak penghasilan (PPh)	858.482.548
10	Taksiran pajak penghasilan	254.623.700
11	Laba/rugi tahun berjalan	603.858.848

Sumber : PT BPR Surya Artha Utama Surabaya

**Tabel 8 Laporan Laba Rugi PT BPR Surya Artha Utama Surabaya
31 Desember 2009**

(dalam rupiah)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2009
1	Pendapatan Operasional	
	a. Bunga	5.175.916.000
	b. Provisi dan komisi	373.740.000
	c. Lainnya	116.472.000
2	Jumlah pendapatan operasional	5.666.128.000
3	Pendapatan non operasional	287.319.000
4	Jumlah pendapatan	5.953.447.000
5	Beban operasional	
	a. Beban bunga	2.355.574.000
	b. Beban administrasi dan umum	966.754.000
	c. Beban personalia	995.837.000
	d. Penyisihan aktiva produktif	22.738.000
	e. Beban operasional lainnya	371.616.000
6	Jumlah beban operasional	4.712.519.000
7	Beban non operasional	34.686.000
8	Jumlah beban	4.747.205.000
9	Laba/rugi sebelum pajak penghasilan (PPh)	1.206.242.000
10	Taksiran pajak penghasilan	205.652.000
11	Laba/rugi tahun berjalan	1.000.590.000

Sumber : PT BPR Surya Artha Utama Surabaya

**Tabel 9 Laporan Laba Rugi PT BPR Surya Artha Utama Surabaya
31 Desember 2010**

(dalam rupiah)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2010
1	Pendapatan Operasional	
	a. Bunga	6.150.856.000
	b. Provisi dan komisi	75.406.000
	c. Lainnya	52.565.000
2	Jumlah pendapatan operasional	6.278.827.000
3	Pendapatan non operasional	311.151.000
4	Jumlah pendapatan	6.589.978.000
5	Beban operasional	
	1. Beban bunga	2.736.178.000
	2. Beban administrasi dan umum	1.138.726.000
	3. Beban personalia	1.417.156.000
	4. Penyisihan aktiva produktif	65.680.000
	5. Beban operasional lainnya	363.090.000
6	Jumlah beban operasional	5.720.830.000
7	Beban non operasional	23.461.000
8	Jumlah beban	5.744.290.000
9	Laba/rugi sebelum pajak penghasilan (PPh)	845.686.000
10	Taksiran pajak penghasilan	155.129.000
11	Laba/rugi tahun berjalan	690.557.000

Sumber : PT BPR Surya Artha Utama Surabaya

2. Kebijakan Kredit PT BPR Surya Artha Utama

a. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan

PT BPR Surya Artha Utama Surabaya menerapkan batas maksimal untuk pemberian kredit bagi masyarakat sebagai upaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, yaitu bank memberikan pinjaman kepada pihak peminjam atau kelompok peminjam masing-masing diberikan setinggi-tingginya 20% dari modal bank. PT BPR Surya Artha Utama menghindari kredit yang digunakan untuk:

- 1) Kredit untuk tujuan spekulasi
- 2) Kredit yang diberikan tanpa informasi yang lengkap
- 3) Kredit kepada debitur bermasalah atau macet pada bank lain
- 4) Kredit yang sulit dilakukan supervisinya
- 5) Kredit dengan agunan yang tidak *marketable*
- 6) Kredit dengan agunan yang tidak didasarkan pada bukti kepemilikan secara sah yuridis
- 7) Kredit yang digunakan untuk usaha yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum

b. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PT BPR Surya Artha Utama Surabaya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan kredit pada PT BPR Surya Artha Utama Surabaya

- 2) Pemohon mengisi formulir yang disediakan bank untuk mendapatkan informasi pokok tentang pemohon kredit
- 3) Daftar isian dan informasi dipelajari oleh bank dan dibuat laporan singkat sebagai hasil penelitian pendahuluan
- 4) Hasil penelitian pendahuluan tersebut diajukan kepada direksi atau kabag operasional untuk mendapatkan informasi
- 5) Kunjungan ke lokasi pemohon untuk mendapatkan informasi tambahan
- 6) Membuat laporan penilaian beserta rekomendasinya
- 7) Pengajuan laporan penilaian beserta rekomendasinya ke kabag operasional
- 8) Persetujuan kredit oleh direksi atau dewan komisaris atau kabag operasional
- 9) Pemberitahuan resmi kepada pemohon kredit tentang persetujuan kredit
- 10) Pemenuhan syarat-syarat penandatanganan perjanjian kredit
- 11) Pemenuhan syarat pencairan kredit dan pengikatan barang jaminan
- 12) Kredit siap dicairkan
- 13) Mengadministrasikan dokumen kredit yang direalisasikan
- 14) Pembinaan dan pengawasan kredit sampai dinyatakan lunas.

c. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

Bagian yang terlibat dalam manajemen perkreditan adalah:

- 1) Direksi

Tugas dan fungsi direksi dalam manajemen perkreditan adalah:

- a) Menyusun dan mengusulkan kebijaksanaan perkreditan kepada dewan komisaris untuk mendapatkan persetujuan

- b) Menyusun, menetapkan dan memantau prosedur perkreditan
- c) Memastikan bahwa penerapan kebijaksanaan kredit telah dilakukan dengan konsisten dan konsekuen
- d) Menyusun dan mengusulkan rencana kerja perkreditan yang tertuang baik dalam rencana kerja tahunan maupun rencana kerja jangka pendek
- e) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan pengawas intern
- f) Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada dewan komisaris disertai langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan sekurang-kurangnya mengenai:
 - 1) Perkembangan dan kualitas portofolio secara keseluruhan
 - 2) Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan bank dan debitur tertentu
 - 3) Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah
 - 4) Penyimpangan dalam pelaksanaan perkreditan
 - 5) Temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh pengawas intern
 - 6) Pelaksanaan dari rencana perkreditan sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan BI
 - 7) Penyimpangan atau pelanggaran ketentuan dibidang perkreditan
- g) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mengembangkan perkreditan

- h) Mengajukan permohonan kredit diatas wewenang direksi untuk mendapatkan persetujuan dewan komisaris
- i) Mengajukan permohonan penghapusbukuan kredit macet dan pencairan agunan kepada dewan komisaris
- j) Mengajukan permohonan keringanan pembayaran pajak, bunga dan denda kredit kepada dewan komisaris
- k) Melakukan tugas-tugas lain dibidang perkreditan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Wewenang dan tanggung jawab direksi:

- a) Memberikan persetujuan atas permohonan kredit sesuai kewenangannya
- b) Menetapkan kuasa yang memutus permintaan pinjaman bagi petugas kredit
- c) Menetapkan kuasa memutus pemberian keringanan bunga dan denda kredit
- d) Menetapkan besarnya suku bunga kredit dan biaya-biaya perkreditan
- e) Menetapkan ketentuan dan peraturan perkreditan
- f) Memberikan persetujuan penghapus bukuan kredit macet dan pencairan agunan sesuai dengan kewenangannya
- g) Memberikan persetujuan atas permohonan keringanan pembayaran pokok bunga dan denda kredit sesuai dengan batas kewenangannya
- h) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas dan wewangannya dibidang perkreditan

2) Kepala Bagian Operasional

Fungsi dan tugas yang dilakukan oleh kepala bagian operasional adalah:

- a) Mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam kebijaksanaan perkreditan dan ketentuan-ketentuan perbankan dibidang perkreditan
- b) Melaksanakan prosedur pemberian kredit yang sehat secara benar dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pedoman prosedur perkreditan
- c) Mengelola portofolio kredit
- d) Mengadministrasikan dokumen-dokumen perkreditan
- e) Melakukan pembinaan kepada debitur secara berkesinambungan
- f) Membuat laporan-laporan perkreditan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g) Melakukan tugas-tugas lain yang dibidang perkreditan yang diberikan oleh direksi

Sedangkan wewenang dan tanggung jawab kepala bagian operasional adalah:

- a) Memberikan persetujuan atas permohonan kredit sesuai dengan kewenangannya
- b) Memutuskan pencairan atas barang agunan kredit dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan kewenangannya
- c) Memberikan keringanan pembayaran pokok, bunga dan denda kredit sesuai dengan kewenangannya

- d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas dan wewenangnya dibidang perkreditan

d. Kebijakan Persetujuan Kredit

Kebijakan persetujuan kredit diterapkan oleh PT BPR Surya Artha Utama mulai dari pengajuan kredit sampai dengan kredit lunas. Kebijakan yang diterapkan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1) Tahap penelitian

Tahap penelitian merupakan tahap awal dari proses pemberian kredit, sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini sangat menentukan tahapan berikutnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan kredit dari pemohon dicatat dalam agenda permohonan kredit. Setelah mendapatkan disposisi dari direksi atau kabag operasional permohonan kredit diteruskan ke petugas perkreditan
- b) Pemohon diminta untuk mengisi formulir isian yang telah disediakan oleh bank untuk mendapatkan informasi pokok tentang pemohon kredit
- c) Petugas kredit meminta informasi bank termasuk meneliti daftar hitam dan daftar kredit macet dari Bank Indonesia serta informasi lain yang berkaitan dengan diri pemohon
- d) Daftar isian dan informasi yang telah didapatkan dibuatkan laporan singkat sebagai laporan pendahuluan

- e) Pengajuan permohonan kredit beserta laporan penilaian pendahuluan diajukan kepada direksi atau kabag operasional untuk mendapatkan persetujuan
 - f) Melakukan kunjungan ke lokasi pemohon untuk mendapatkan persetujuan
 - g) Melakukan kunjungan ke lokasi pemohon untuk mendapatkan tambahan informasi untuk proses penelitian
- 2) Tahap Penilaian

Untuk dapat melakukan penilaian dengan baik dibutuhkan data penunjang yang lengkap. Tahap penilain pemberian kredit, perusahaan menggunakan prinsip 5C. prinsip 5C yang digunakan perusahaan adalah:

a) *Character*

- Siapakah pemohon
- Latar belakang keluarga
- Memeriksa catatan hubungan pemohon dengan bank dan bank lainnya

b) *Capacity*

- Bagaimana pengalaman usaha pemohon
- Bagaimana kemampuan manajemen pemohon
- Bagaimana pengalaman pemohon dengan usaha yang sedang dimintakan pembiayaan

c) *Capital*

- Bank harus mengetahui struktur permodalan pemohon, jumlah kebutuhan biaya usaha, serta dikaitkan dengan jumlah kredit yang diajukan pemohon
- Mengetahui posisi keuangan pemohon pada waktu permohonan kredit
- Mengetahui kebutuhan investasi dan modal kerja yang dibutuhkan oleh pemohon

d) *Collateral*

- Bank harus mengetahui keabsahan atas kekayaan yang dijadikan jaminan

e) *Condition*

- Jumlah permintaan dan penawaran produk
- Harga produk dan pendapatan atas produk

3) Tahap Persetujuan Kredit

Tahap persetujuan setelah tahap penilaian dilakukan dalam bentuk laporan penilaian kredit serta dilapori dengan rekomendasinya. Apabila dalam penilaian kredit dinyatakan bahwa usaha yang diajukan tidak layak untuk dibiayai, maka akan segera member disposisi penolakan permohonan yang diajukan dan segera disampaikan kepada pemohon kredit. Namun bila dalam penilaian kredit dinyatakan bahwa usaha yang diajukan layak untuk dibiayai, maka direktur memberikan persetujuan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Persetujuan permohonan kredit diberikan bila kredit yang diputuskan dalam kewenangan memutuskan kredit dari direktur
- b) Bila kredit yang diputuskan diluar kewenangan dari direktur untuk memutus kredit, maka dibuat rekomendasi yang diajukan kepada dewan komisaris agar mendapatkan persetujuan.

Dasar pertimbangan yang dipergunakan untuk memberikan persetujuan kredit adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan kredit harus diajukan secara tertulis
 - b) Permohonan kredit harus dilampiri dengan informasi bank dan atau informasi lain dari pemohon, serta dilampiri pula riwayat kredit yang pernah diperoleh pemohon
 - c) Telah dilakukan analisa secara cermat yang meliputi aspek manajemen, teknis, pemasaran dan keuangan.
- 4) Tahap Realisasi dan Pencairan Kredit
- a) Syarat-syarat realisasi (penandatanganan kredit)
 - Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan
 - Menyelesaikan surat bukti kepemilikan barang agunan
 - Pengikatan barang-barang yang dijadikan agunan
 - Syarat-syarat khusus lainnya
 - Telah menyelesaikan pembayaran biaya perkreditan yang telah ditetapkan
 - b) Syarat pencairan
 - Telah dilakukan penandatanganan akad kredit

- Telah dilakukan pengikatan barang agunan
- Pencairan disesuaikan dengan kebutuhan
- Telah melengkapi syarat-syarat pencairan lainnya

5) Tahap Administrasi

Administrasi dan dokumentasi perkreditan adalah merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank dalam proses pemberian kredit. Kegiatan administrasi dan dokumentasi diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional bank, baik untuk keperluan petugas kredit dalam kegiatan pengelolaan kredit, maupun untuk keperluan pembuktian. Dokumentasi perkreditan terdiri dari:

a) Dokumen pokok

- Surat persetujuan pemberitahuan kredit
- Surat perjanjian kredit beserta perjanjian lainnya
- Perjanjian pengikatan barang jaminan
- Bukti asli kepemilikan agunan kredit
- Polis asuransi

b) Dokumen pendukung

- Surat permohonan kredit
- Identitas pemohon kredit, legalitas usaha
- Informasi bank serta informasi lainnya
- Laporan kunjungan kelokasi usaha
- Informasi penilaian barang jaminan
- Laporan penilaian kredit

- Rekomendasi pejabat pemberi kredit
- Dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses pemberian kredit

Selain dokumentasi perkreditan, terdapat administrasi perkreditan. Administrasi perkreditan dilakukan untuk penilaian perkembangan, pengawasan kredit, perlindungan kepentingan bank, serta untuk keperluan-keperluan yang ada hubungannya dengan perkreditan. Kegiatan administrasi perkreditan meliputi:

- a) Administrasi permohonan kredit
 - b) Administrasi realisasi kredit
 - c) Register pembayaran biaya materai
 - d) Register asuransi
 - e) Laporan perkreditan bank intern maupun ekstern
- 6) Tahap supervisi

Kegiatan supervisi kredit merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pejabat pemberi kredit sejak kredit diberikan sampai dengan kredit dinyatakan lunas. Dengan demikian perkembangan debitur dapat dimonitor dengan baik, sehingga bila terjadi penurunan kualitas debitur maupun ada hal yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan secara dini dapat dilaporkan dan diambil langkah-langkah pengamanan.

- a) Tujuan supervise kredit
 - Untuk memastikan bahwa dana dari fasilitas kredit dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
 - Agar kualitas kredit dapat dipantau sejak dini secara intensif

- Memonitor perkembangan kredit sehingga menghindarkan terjadinya kredit bermasalah
- Kredit dapat diselesaikan tepat pada waktunya

b) Pelaksanaan supervisi kredit.

Pelaksanaan supervisi kredit dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu supervisi pasif dan supervisi aktif. Supervisi pasif yang dilakukan dengan pemantauan dan penelitian terhadap:

- Kelancaran pembayaran angsuran pokok
- Kelancaran pembayaran bunga pinjaman
- Laporan keuangan yang disampaikan oleh debitur
- Informasi lain yang diperoleh berkaitan dengan debitur

Sedangkan supervisi aktif dilakukan dengan cara:

- Melakukan kunjungan kelokasi usaha debitur
- Mengidentifikasi permasalahan bila ada dan mendeteksi aspek-aspek apa yang terjadi permasalahan
- Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh debitur
- Memberikan saran pemecahan atas masalah yang dihadapi debitur.

c) Pelaporan supervisi kredit

Laporan yang dibuat atas kegiatan supervisi kredit harus memenuhi standart sebagai berikut:

- Tertulis, singkat, jelas dan mudah dimengerti
- Obyektif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan

- Permasalahan yang dihadapi debitur dikemukakan dengan jelas
- Usulan saran pemecahan masalah.

Laporan supervisi kredit atas masing-masing debitur bersifat intern, dan harus disampaikan untuk kepentingan manajemen sebagai dasar pertimbangan pengambilan langkah-langkah kebijaksanaan yang akan diambil oleh manajemen.

e. Pengawasan Kredit

Untuk menghindari berbagai resiko serta kemungkinan terjadinya penyimpangan yang akan timbul akibat kegiatan pemberian kredit, maka perlu diterapkan fungsi pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh dan komprehensif berbentuk sistem pengendalian intern. Pengendalian intern perkreditan bank meliputi pengawasan dibidang perkreditan berupa pengawasan langsung maupun tidak langsung oleh pimpinan atas setiap pelaksanaan pemberian kredit serta pemeriksaan intern yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab. Langkah pengawasan kredit yang dilakukan bank adalah:

- 1) Melakukan monitoring sedini mungkin untuk mendeteksi sinyal-sinyal terhadap adanya penyimpangan yang mungkin akan terjadi
- 2) Melakukan pembinaan kepada debitur agar dapat memenuhi seluruh kewajibannya
- 3) Memantau dan mengawasi secara khusus pemberian kredit sesuai ketentuan
- 4) Membuat laporan atas terjadinya penyimpangan kepada direksi

f. Penyelesaian kredit bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kredit menjadi lebih baik serta penyelamatan kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit yang tergolong atau diklasifikasikan diragukan dan macet serta kredit yang tergolong lancar namun ada kecenderungan memburuk kualitasnya. Penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah dilakukan dengan cara dengan cara:

1) *Rescheduling*

Rescheduling yang dilakukan oleh bank adalah dengan memberikan perpanjangan masa pembayaran.

2) *Reconditioning*

Langkah penyelamatan *reconditioning* yang dilakukan bank adalah dengan cara meninjau kembali perjanjian kredit yang telah disepakati agar kredit yang telah disalurkan dapat kembali. *Reconditioning* dapat berupa perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja, tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit.

3) *Restructuring*

Langkah penyelamatan dengan jalan *restructuring* dilakukan dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit

C. Analisis dan Intepretasi Data

1. Analisis Rasio Keuangan Bank

a. Pengukuran Kebijakan Pemberian Kredit

1) *Loan to Deposit Ratio*

Besarnya tingkat *loan to deposit ratio* dapat dihitung dengan membandingkan total kredit (*total loans*) dengan total deposit dan modal sendiri (*equity*). *Loan to deposit ratio* secara matematis dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

Tabel 10 *Loan to Deposit Ratio* PT BPR Surya Artha Utama Surabaya Tahun 2008-2010

Tahun	Total Loans (Rp)	Total Deposit + Equity (Rp)	Loan to Deposit Ratio (%)
2008	20.776.423.260	13.621.504.032	152,53%
2009	26.562.648.000	15.590.771.000	170,37%
2010	30.632.073.000	21.519.747.000	142,34%

Sumber: Data diolah

Loan to deposit ratio bertujuan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah diberikan kepada masyarakat. Dari perhitungan tabel 10 dapat dilihat bahwa *loan to deposit ratio* perusahaan mengalami fluktuasi. Presentase *loan to deposit ratio* pada tahun 2008 adalah sebesar 152,53%, tahun 2009

sebesar 170,37%, dan pada tahun 2010 sebesar 142,34%. Besarnya *loan to deposit ratio* menurut pemerintah maksimum adalah 110%. Berdasarkan perhitungan diatas, *loan to deposit ratio* perusahaan melebihi 110% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan tingkat likuiditas yang kurang baik karena tingkat LDR yang dimiliki bank melebihi batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) *Capital adequacy ratio* (CAR)

CAR adalah perbandingan antara jumlah modal yang dimiliki suatu bank dengan aktiva tertimbang menurut resiko. CAR minimum bagi bank umum non devisa sekurang-kurangnya 8%. CAR secara matematis dapat dihitung dengan rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

**Tabel 11 Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
PT BPR Surya Artha Utama Surabaya Tahun 2008**

Keterangan	Bobot ATMR	Aktiva (Rp)	ATMR
Kas	0%	576.670.430	0
Antar bank aktiva	20%	2.040.441.592	408.088.318
Kredit yang diberikan	100%	20.776.423.260	20.776.423.260
Aktiva tetap dan inventaris	100%	783.086.450	783.086.450
Akumulasi penyusutan	100%	(248.922.298)	(248.922.298)
Aktiva lain-lain	100%	382.612.220	381.612.220
		Jumlah ATMR	22.100.287.950

Sumber: Data diolah

**Tabel 12 Aktiva Tertimbang Manurut Risiko (ATMR)
PT BPR Surya Artha Utama Surabaya Tahun 2009**

Keterangan	Bobot ATMR	Aktiva	ATMR
Kas	0%	120.969.000	0
Antar bank aktiva	20%	2.109.083.000	421.816.600
Kredit yang diberikan	100%	26.562.648.000	26.562.648.000
Aktiva tetap dan inventaris	100%	844.884.000	844.884.000
Akumulasi penyusutan	100%	(393.945.000)	(393.945.000)
Aktiva lain-lain	100%	359.373.000	359.373.000
		Jumlah ATMR	27.794.776.600

Sumber: Data diolah

**Tabel 13 Aktiva Tertimbang Manurut Risiko (ATMR)
PT BPR Surya Artha Utama Surabaya Tahun 2010**

Keterangan	Bobot ATMR	Aktiva	ATMR
Kas	0%	386.876.000	0
Antar bank aktiva	20%	2.781.052.000	556.210.400
Kredit yang diberikan	100%	30.632.073.000	30.632.073.000
Aktiva tetap dan inventaris	100%	851.491.000	851.491.000
Akumulasi penyusutan	100%	(495.480.000)	(495.480.000)
Aktiva lain-lain	100%	690.178.000	690.178.000
		Jumlah ATMR	32.234.472.400

Sumber: Data diolah

Tabel 14 *Capital adequacy ratio (CAR) PT BPR Surya Artha Utama Surabaya Tahun 2008-2010*

Tahun	Modal Bank	ATMR	CAR
2008	3.321.652.020	22.100.287.950	15,02%
2009	4.238.171.000	27.794.776.600	15,25%
2010	4.284.274.000	32.234.472.400	13,29%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 14, dapat dilihat bahwa CAR bank mengalami fluktuasi dari tahun 2008-2010. Pada periode tahun 2008-2009 CAR bank mengalami kenaikan sebesar 0,23%, namun pada periode tahun 2009-2010 mengalami penurunan sebesar 1,96%. Menurunnya CAR pada tahun 2010 disebabkan oleh semakin besarnya kredit yang diberikan tidak disesuaikan dengan modal yang dimiliki. Meskipun CAR masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan BI yaitu 8%, namun bank harus tetap berusaha agar CAR bank tidak menurun hingga batas minimum dengan penambahan modal bila ingin menambah jumlah kredit yang diberikan.

b. Analisis Rasio Likuiditas

1) Quick Ratio

Quick ratio bertujuan untuk mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya kepada deposan dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank. Tingkat *quick ratio* dapat ditentukan dengan cara membandingkan antara aktiva yang paling

likuid yaitu aset kas (*cash assets*) dengan total deposit. *Quick ratio* secara matematis dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Assets}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

Bila tingkat *quick ratio* suatu perusahaan kurang dari 100%, maka dapat dikatakan kurang baik tingkat likuiditasnya.

Tabel 15 *Quick Ratio* PT BPR Surya Artha Utama Surabaya Tahun 2008-2010

Tahun	Cash Assets (Rp)	Total Deposit (Rp)	Quick Ratio (%)
2008	2.617.112.022	10.299.852.018	25,41%
2009	2.229.452.000	11.352.600.000	19,64%
2010	3.167.928.000	17.235.473.000	18,38%

Sumber : Data diolah

Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa *quick ratio* PT BPR Surya Artha Utama Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Presentase *quick ratio* tahun 2008 sebesar 25,41%, tahun 2009 sebesar 19,64%, dan tahun 2010 sebesar 18,38%. *Quick ratio* tahun 2008-2009 menurun sebesar 5,77%, dan pada tahun 2009-2010 menurun sebesar 1,26%. Secara umum *quick ratio* sebesar 100% dapat dikatakan baik, namun *quick ratio* pada perusahaan selama 3 tahun berturut-turut menunjukkan tingkat likuiditas yang rendah dan cenderung menurun setiap tahunnya. Perusahaan harus

mampu meningkatkan tingkat likuiditas agar dapat memberikan rasa aman kepada para deposan yang dimiliki bank.

2) *Banking Ratio*

Tingkat *Banking ratio* perusahaan dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah kredit (*total loans*) yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. *Banking ratio* secara matematis dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit}} \times 100 \%$$

Banking ratio bertujuan mengukur tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditas bank semakin rendah.

Tabel 16 *Banking Ratio* PT BPR Surya Artha Utama Surabaya Tahun 2008-2010

Tahun	Total Loans (Rp)	Total Deposit (Rp)	Banking Ratio (%)
2008	20.776.423.260	10.299.852.018	201,71%
2009	26.562.648.000	11.352.600.000	233,98%
2010	30.632.073.000	17.235.473.000	177,67%

Sumber : Data diolah

Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa *banking ratio* perusahaan mengalami fluktuasi. Presentase *banking ratio* yang dimiliki perusahaan pada tahun 2008 sebesar 201,71%, tahun 2009 sebesar 233,98%, dan pada tahun 2010 sebesar 177,67%. Semakin tinggi *banking ratio* berarti makin rendah tingkat likuiditas bank karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit

semakin kecil. Melihat tingginya *banking ratio* ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat likuiditas bank termasuk rendah dan dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil.

c. Analisis Rasio Profitabilitas

1) *Gross Profit Margin*

Gross profit margin ditentukan dengan cara membandingkan jumlah pendapatan operasional (*operating income*) dikurangi beban operasional (*operating expense*) dengan jumlah pendapatan operasional. *Gross profit margin* secara matematis dapat dihitung dengan rumus:

$$GPM = \frac{\text{Operating Income} - \text{Operating Expense}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

Tabel 17 *Gross Profit Margin* PT BPR Surya Artha Utama Surabaya Tahun 2008-2010

Tahun	<i>Operating income – operating expense (Rp)</i>	<i>Operating income (Rp)</i>	<i>Gross Profit Margin (%)</i>
2008	822.510.351	4.523.460.973	18,18%
2009	953.609.000	5.666.128.000	16,83%
2010	557.997.000	6.278.827.000	8,89%

Sumber: Data diolah

Gross profit margin digunakan untuk mengetahui presentase laba perusahaan. Dari perhitungan *gross profit margin* PT BPR Surya Artha Utama Surabaya tersebut, dapat dilihat bahwa perusahaan

mengalami penurunan. Nilai *gross profit margin* pada tahun 2008 sebesar 18,18%, tahun 2009 mengalami penurunan 1,35 % menjadi 16,83%, dan pada 2010 mengalami penurunan 7.64% menjadi 9,19%. Penurunan terjadi karena semakin tingginya pendapatan operasional, semakin besar pula beban perusahaan yang harus ditanggung. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perusahaan kurang optimal dalam mendapatkan laba yang diperoleh dari kegiatan operasional bank.

2) *Net Profit Margin*

Net profit margin bertujuan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan pendapatan operasional. *Net profit margin* dapat dihitung melalui laba bersih setelah pajak (*net income*) dibagi dengan pendapatan operasional. *Net profit margin* secara matematis dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

Tabel 18 *Net Profit Margin* PT BPR Surya Artha Utama Surabaya Tahun 2008-2010

Tahun	<i>Net Income</i> (Rp)	<i>Operating</i> <i>Income</i> (Rp)	<i>Net Profit</i> <i>Margin</i> (%)
2008	603.858.848	4.523.460.973	13,35%
2009	1.000.590.000	5.666.128.000	17,66%
2010	690.557.000	6.278.827.000	11,89%

Sumber: Data diolah

Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa *net profit margin* perusahaan mengalami fluktuasi. *Net profit margin* pada tahun 2008-2009 mengalami kenaikan sebesar 4,31%, dan pada tahun 2009-2010 mengalami penurunan sebesar 5,99%. Kenaikan *Net profit margin* pada tahun 2009 dipengaruhi oleh perbedaan pajak yang dikenakan. Pada tahun 2008 pajak yang dikenakan merata untuk perusahaan kecil, perusahaan berkembang, dan perusahaan besar, sedangkan pada tahun 2009 pajak dikenakan sesuai keadaan perusahaan. Berdasarkan data diatas dapat dikatakan perusahaan kurang optimal dalam menjaga kestabilan perolehan laba perusahaan.

3) *Return On Equity Capital*

Return On Equity Capital (ROE) bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola *capital* yang ada untuk mendapatkan *net income*. ROE dapat dihitung dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak (*net income*) dengan modal sendiri (*equity*). ROE secara matematis dapat dihitung dengan rumus:

$$ROE = \frac{Net\ Income}{Equity\ Capital} \times 100\%$$

**Tabel 19 Return On Equity Capital PT BPR Surya Artha
Utama Surabaya Tahun 2008-2010**

Tahun	Net Income (Rp)	Equity (Rp)	ROE (%)
2008	603.858.848	3.321.652.014	18,18%
2009	1.000.590.000	4.238.171.000	23,61%
2010	690.557.000	4.284.274.000	16,11%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat ROE mengalami fluktuasi. ROE pada tahun 2008-2009 mengalami kenaikan sebesar 5,43%, dan pada tahun 2009-2010 mengalami penurunan sebesar 6,19%. Fluktuasi ROE pada perusahaan dapat diartikan bahwa perusahaan kurang optimal dalam menggunakan modal yang dimiliki bank untuk mendapatkan laba setiap tahunnya.

4) *Net Income Total Assets*

Net income total assets bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara keseluruhan. *Net income total assets* dapat ditentukan dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak (*net income*) dengan total aset yang dimiliki perusahaan. *Net income total assets* secara matematis dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Net Income Total Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Tabel 20 Net Income Total Assets PT BPR Surya Artha Utama Surabaya Tahun 2008-2010

Tahun	Net Income (Rp)	Total Assets (Rp)	Net Income Total Assets (%)
2008	603.858.848	24.196.229.041	2,49%
2009	1.000.590.000	29.465.592.000	3,39%
2010	690.557.000	34.626.368.000	1,99%

Sumber: Data diolah

Dari perhitungan *net income total assets* tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan mengalami fluktuasi. *Net income total asset* yang dihasilkan perusahaan pada tahun 2008-2009 mengalami kenaikan sebesar 0,9%, sedangkan pada tahun 2009-2010 mengalami penurunan sebesar 1,24%. Berdasarkan perubahan *net income total assets* yang tidak menentu, hal ini menunjukkan kurang optimalnya kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas.

5) *Rate Return on Loans*

Rate return on loans bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditannya. *Rate return on loans* dapat ditentukan dengan cara membandingkan antara pendapatan bunga (*interest income*) dengan jumlah kredit yang diberikan (*total loans*). *Rate return on loans* secara matematis dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rate Return on Loans} = \frac{\text{Interest Income}}{\text{Total Loans}} \times 100\%$$

Tabel 21 Rate return on loans PT BPR Surya Artha Utama Surabaya Tahun 2008-2010

Tahun	Interest Income (Rp)	Total Loans (Rp)	Rate return on loans (%)
2008	4.422.186.576	20.776.423.260	21,28%
2009	5.549.656.000	26.562.648.000	20,89%
2010	6.226.262.000	30.632.073.000	20,32%

Sumber: Data diolah

Dari perhitungan *rate return on loans* tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan kurang optimalnya manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditannya sehingga bank memiliki masalah dengan tingkat profitabilitasnya. Perusahaan selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan persentase diatas, pada tahun 2008-2009 perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,39%, sedangkan pada tahun 2009-2010 perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,57%.

Berdasarkan perhitungan rasio keuangan bank yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa bank memiliki pengelolaan kredit yang kurang optimal. Tingkat likuiditas yang didapatkan oleh bank relatif rendah, kemudian bank juga kurang mampu dalam menjaga tingkat profitabilitas. Rendahnya tingkat likuiditas disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di BPR. Sedangkan tingkat profitabilitas mengalami fluktuasi. *Gross profit margin* dan *rate return on loans* mengalami penurunan dari tahun 2008-2009, sedangkan *net profit margin*,

ROE, dan *net income total asset* naik pada tahun 2008 dan turun pada tahun 2010. Penurunan profitabilitas pada tahun 2010 disebabkan terjadinya kredit bermasalah karena kredit yang diberikan tidak kembali tepat pada waktunya dan tingginya beban operasional perusahaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan operasional sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba perusahaan.

2. Analisis Kebijakan Kredit

Analisis kebijakan kredit bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan kredit yang ditetapkan oleh PT BPR Surya Artha Utama Surabaya sesuai dengan kriteria kebijakan kredit yang baik. Analisis kebijakan kredit meliputi:

a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan

PT BPR Surya Artha Utama Surabaya telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perkreditannya. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan adalah dengan menentukan batas maksimal pinjaman yang diberikan, menentukan jenis-jenis usaha yang tidak boleh dibiayai, serta menentukan prosedur pemberian kredit. Batas maksimal yang ditentukan adalah sebesar 20% dari modal yang dimiliki bank. Jenis-jenis usaha yang dihindari bank adalah kredit untuk tujuan spekulasi, kredit yang diberikan tanpa informasi yang lengkap, kredit yang sulit dilakukan supervisinya, kredit dengan agunan yang tidak *marketable*, kredit dengan agunan yang tidak

didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah yuridis dan kredit yang digunakan untuk usaha yang bertentangan dengan norma kesusilaan.

b. Organisasi dan manajemen perkreditan

Organisasi dan manajemen perkreditan yang dijalankan bank sudah baik. Bank telah membagi tugas dan wewenang kepada tiap jabatan yang berkenaan dengan prosedur perkreditan. Bagian yang terlibat dalam manajemen perkreditan adalah direksi dan kepala bagian operasional. Direksi bertugas untuk menyusun kebijakan perkreditan, mengawasi kegiatan perkreditan, melaporkan kegiatan perkreditan kepada dewan direksi secara berkala, mengajukan permohonan pencairan agunan kepada dewan komisaris bila terjadi kredit macet. Kepala bagian operasional bertugas melakukan kegiatan perkreditan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan direksi.

c. Kebijaksanaan persetujuan kredit

Kebijaksanaan persetujuan kredit PT BPR Surya Artha Utama Surabaya dilakukan dimulai dari tahap penelitian, tahap penilaian, tahap persetujuan kredit, tahap realisasi dan pencairan kredit, tahap administrasi dan tahap supervisi. Bebearpa tahap sudah dilakukan dengan baik, namun ada beberapa tahapan yang perlu dibenahi. Beberapa tahapan yang perlu dibenahi yaitu:

- 1) Tahap penilaian yang dilakukan bank adalah dengan melakukan penilaian 5C, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam

prinsip 5C yang sudah diterapkan. Beberapa masalah yang menimbulkan kredit bermasalah adalah:

- a) Ketidaktepatan petugas kredit dalam melakukan analisis 5C sebagai penilaian calon debitur
- b) Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank sehingga terjadinya kredit macet.

Perbaikan prinsip 5C yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- *Character*

Analisis dalam segi *character* PT BPR Surya Artha Utama Surabaya sudah cukup baik, namun akan lebih baik lagi bila bank mengetahui tentang hobi dan gaya hidup pemohon sehingga akan lebih mempermudah bank dalam menilai *character* pemohon kredit.

- *Capacity*

Analisis *capacity* dilakukan oleh PT BPR Surya Artha Utama Surabaya untuk menilai calon pemohon apakah pemohon mampu mengembalikan kredit yang diberikan berdasarkan kemampuannya mengelola bisnis dan mendapatkan laba. PT BPR Surya Artha Utama Surabaya sudah baik dalam melakukan analisis *capacity* yang didasarkan pada pengalaman usaha dan kemampuan manajemen yang dimiliki pemohon, namun bank juga harus mengetahui pengeluaran rutin tiap bulan pemohon agar bank

mengetahui kemampuan pemohon dalam membayar kreditnya sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kredit macet.

- *Capital*

Analisis *capital* dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana atau sumber pembiayaan yang dimiliki oleh pemohon kredit. Modal dasar pemohon dapat dilihat melalui laporan keuangan usaha pemohon. Laporan keuangan pemohon juga akan mencerminkan kondisi keuangan pemohon. Bank harus mengetahui jumlah modal yang dimiliki karena kredit berfungsi sebagai tambahan modal, bukan untuk membiayai seluruh kebutuhan modal.

- *Collateral*

PT BPR Surya Artha Utama sudah baik dalam melakukan analisis *collateral*. Bank melakukan pengecekan terhadap barang yang akan dijadikan jaminan pemohon. Bagi pemohon yang menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor, bank akan melihat BPKB kendaraan bermotor, serta nomor gesek rangka kendaraan bermotor. Untuk jaminan rumah, maka akan dilihat sertifikat yang dijadikan jaminan pemohon apakah benar-benar milik pemohon.

- *Condition*

Analiss *condition* yang dimaksud adalah melihat bagaimana kondisi ekonomi dimasa sekarang dengan kondisi ekonomi dimasa

yang akan datang. Analisis *condition* akan menilai apakah usaha yang dibiayai bank akan mempengaruhi pemohon di kondisi ekonomi dimasa yang akan datang. Sebelum memberikan kredit, bank sebaiknya melakukan analisis terlebih dahulu mengenai keadaan ekonomi saat ini apakah stabil atau tidak, serta melihat prospek usaha untuk kedepannya.

Selain penerapan prinsip 5C yang telah dilakukan oleh PT BPR Surya Artha Utama Surabaya, penilaian akan lebih akurat bila menambahkan atau mengombinasikan dengan analisis 7P dan 3R. Analisis 7P meliputi *Personality, party, purpose, prospect, payment, profitability* dan *protection*, sedangkan prinsip 3R meliputi *return, repayment, dan risk bearing ability*.

2) Tahap Supervisi

Tahap supervisi merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh bank sejak kredit diberikan sampai dengan kredit dinyatakan lunas. Kegiatan supervise yang dilakukan bank cukup baik, namun pelaksanaannya perlu lebih diperhatikan karena jumlah petugas kredit yang bertugas melakukan supervisi tidak sesuai dengan jumlah nasabah kredit yang dimiliki.

d. Dokumentasi dan administrasi kredit

Dokumentasi dan administrasi kredit yang dilakukan bank sudah cukup baik. Dokumen yang dipersyaratkan bank sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dan telah diadministrasikan

secara baik. Administrasi dokumen bertujuan untuk mendukung penilaian atas perkembangan kredit atau usaha nasabah dan pengawas kredit sehingga kepentingan bank dapat terlindungi.

e. Pengawasan kredit

Pengawasan kredit merupakan hal yang penting dan harus dilakukan oleh setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan perkreditan. PT BPR Surya Artha Utama Surabaya melakukan pengawasan secara intern dan ekstern. Pengawasan secara intern dilakukan dengan melakukan pengawasan kepada petugas kredit, dan pengawasan ekstern untuk melakukan pengawasan kepada nasabah kreditnya dengan cara melakukan pembinaan kepada debitur. Beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pengawasan kredit adalah:

- 1) Sebaiknya pengawasan kredit tidak hanya dilakukan oleh petugas kredit karena petugas kredit telah merangkap beberapa tugas mulai dari penilaian sampai dengan pengawasan kredit. Banyaknya tugas yang dibebankan kepada petugas kredit akan rawan terhadap tindakan ketidak jujuran mengenai informasi pemohon.
- 2) Pihak bank sebaiknya rutin mengingatkan nasabah dengan cara menelpon atau mengirim surat kepada nasabah bila tanggal jatuh tempo sudah dekat. Tindakan tersebut akan membuat nasabah bersiap-siap untuk membayar tagihannya kepada bank. Bila telah melewati batas pembayaran, pihak bank bisa mengirim petugas kredit untuk menagih kredit.

f. Penyelesaian kredit bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan PT BPR Surya Artha Utama Surabaya sudah baik, namun bank bisa menambahkan solusi penyelesaian kredit macet dengan menggunakan cara kombinasi. Kombinasi merupakan gabungan dari ketiga metode yang telah diterapkan bank. Kombinasi dilakukan dengan cara menggabungkan dua metode yang telah dimiliki bank. Bila cara-cara yang telah diupayakan tetap tidak berhasil membantu nasabah, maka bank akan mengambil barang yang telah dijadikan jaminan oleh nasabah.

3. Analisis Kebijakan Kredit untuk Meningkatkan Profitabilitas

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan kredit pada PT BPR Surya Artha Utama Surabaya telah memenuhi standart kebijakan perkreditan yang baik yaitu dengan memuat kebijakan tentang prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan pemberian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, serta penyelesaian kredit, namun demikian pelaksanaan kebijakan tersebut belum dilakukan secara maksimal. Beberapa hal yang harus diperbaiki agar kredit bermasalah yang terjadi pada tahun 2010 dapat ditekan dan tidak cenderung naik yang akan mengganggu pertumbuhan profitabilitas bank. Kredit bermasalah PT BPR Surya Artha Utama Surabaya terjadi pada kredit konsumsi. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Bank terlalu mudah memberikan kredit
- b. Beberapa penilaian 5C tidak dilaksanakan dengan baik untuk kredit konsumsi dengan nilai pinjaman kecil
- c. Kurangnya pengawasan bank terhadap nasabah karena kurangnya jumlah petugas yang melakukan pengawasan.

Untuk meningkatkan profitabilitas, PT BPR Surya Artha Utama Surabaya dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bank harus tetap menerapkan kebijakan kredit sesuai dengan yang ditetapkan baik kredit dengan nilai pinjaman besar maupun pinjaman kecil
- b. Petugas pengawasan kredit juga harus ditambah agar dapat menjalankan tugas pengawasan kredit dengan baik
- c. Bank sebisa mungkin meningkatkan efisiensi biaya operasionalnya untuk memaksimalkan profitabilitas bank.
- d. Bank sebaiknya bekerja sama dengan bendahara instansi agar penghasilan dipotong sesuai jumlah angsuran untuk membayar kreditnya.

Tingkat likuiditas PT BPR Surya Artha Utama Surabaya juga harus diperhatikan agar nasabah percaya untuk menyimpan uangnya di bank, karena semakin besar dana yang tersimpan di bank akan membantu bank untuk menyediakan dana bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. PT BPR Surya Artha Utama Surabaya telah menerapkan kebijakan kredit yang mencakup prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan pemberian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah, namun pada kenyataannya kebijakan kredit tersebut tidak dilaksanakan secara optimal sehingga terjadi kredit macet dan menurunnya profitabilitas bank.
 - a) Prinsip kehati-hatian telah diterapkan dengan baik, yaitu dengan cara menentukan batas maksimal pemberian kredit sebesar 20% dari modal yang dimiliki menentukan jenis kredit yang tidak boleh dibiayai
 - b) Organisasi dan manajemen telah diterapkan dengan membagi tugas dan wewenang pada tiap-tiap jabatan, namun petugas kredit harus ditambah agar proses perkreditan dapat berjalan dengan baik
 - c) Kebijakan persetujuan kredit dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap penelitian, penilaian, persetujuan kredit, realisasi dan pencairan kredit, administrasi dan supervise. Beberapa tahap yang perlu diperbaiki adalah tahap penilaian yang terdiri dari 5C, yaitu *character*, dan *capacity*, serta tahap supervise karena pegawai yang jumlahnya kurang memadai dibandingkan jumlah debitur yang dimiliki.

- d) PT BPR Surya Artha Utama Surabaya telah melakukan dokumentasi dan administrasi dokumen kredit dengan cukup baik yang bertujuan untuk pengawasan kredit sehingga kepentingan bank dapat terlindungi
 - e) Pengawasan kredit telah dilakukan bank secara intern dan ekstern, namun pada kenyataannya pengawasan kredit kurang diperhatikan
 - f) Penyelesaian kredit yang dilakukan bank sudah baik dengan cara *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.
2. Efektivitas kebijakan kredit dapat dinilai dengan analisis rasio keuangan bank berupa rasio likuiditas yang diukur dengan *quick ratio*, *banking ratio*, dan *loan to deposit ratio*, serta ratio profitabilitas yang diukur dengan *gross profit margin*, *net profit margin*, *ROE*, *net income total assets* dan *rate on loans*. Tingkat likuiditas bank fluktuatif dan cenderung menurun merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Tingkat likuiditas bank menjadi rendah terjadi karena pemberian kredit yang diberikan kepada masyarakat tidak disesuaikan dengan dana yang dimiliki bank, bila tidak segera memperbaiki likuiditas yang dimiliki bank, maka akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa bank tersebut. Tingkat perolehan profitabilitas bank mengalami fluktuasi. *Gross profit margin* dan *rate return on loans* mengalami penurunan dari tahun 2008-2009, sedangkan *net profit margin*, *ROE*, dan *net income total asset* naik pada tahun 2008 dan turun pada tahun 2010. Perubahan profitabilitas bank dipengaruhi oleh kredit bermasalah yang

dimiliki oleh bank, serta besarnya beban yang ditanggung perusahaan setiap tahunnya yang selalu bertambah.

B. SARAN

Saran yang dapat peneliti berikan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan adalah:

1. Bank sebaiknya mengoptimalkan analisis 5C yang dilakukan dalam pemberian kredit dan melakukan perbaikan analisis. Perbaikan yang perlu dilakukan meliputi penilaian *character* akan lebih baik bila bank juga mengetahui tentang hobi dan gaya hidup calon debitur, penilaian *capacity* bank harus mengetahui sumber dana pemohon yang digunakan untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kredit macet, selain memperbaiki analisis kredit 5C, sebaiknya bank menambahkan analisis 7P dan 3R agar hasil analisis lebih akurat sehingga akan menekan terjadinya kredit bermasalah pada PT BPR Surya Artha Utama Surabaya. Bank juga sebaiknya memperhatikan dana yang dimiliki bank dalam menyalurkan kreditnya, sehingga tingkat likuiditas yang dimiliki bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Bank juga bisa bekerjasama dengan bendahara instansi untuk menagih kredit yang dipinjam oleh pegawai negeri.
2. Pengawasan kredit yang perlu dilakukan PT BPR Surya Artha Utama Surabaya sebaiknya pengawasan kredit tidak hanya dilakukan oleh petugas kredit karena petugas kredit telah merangkap beberapa tugas mulai dari penilaian sampai dengan pengawasan kredit. Banyaknya tugas yang

dibebankan kepada petugas kredit akan rawan terhadap tindakan ketidakjujuran mengenai informasi pemohon.

3. Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan PT BPR Surya Artha Utama Surabaya bisa menambahkan solusi penyelesaian kredit macet dengan menggunakan cara kombinasi.

